

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arnold, Bria.J. & Michael J. Mc Intyre, *Intenational Tax Primer*, Kluwer Law International, Denhag, The Netherlands: 1995.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco: 1998.
- Doenberg, Richard L., *International Taxation*. Second Edition. West Publising Company: 1993 .
- Gunadi, *Pajak Internasional*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 1997.
- , *Taxation of inbound investment in Indonesia*, Singapore: Asian-Pasific Tax and Investment Research Centre: 1992.
- , *Akuntansi Pajak: Sesuai dengan Undang-Undang Baru*, edisi pertama, PT Grasindo, Jakarta, 1997.
- , dan kawan - kawan, *Perpajakan*, Buku satu, edisi pertama, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- , dan kawan - kawan , *Perpajakan*, Buku dua, edisi pertama, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Ghosh, B.C., *Taxation in Southest Asia, a Comperative Study*, EPB Publisher, 1996.
- Mansury, R., *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Jilid I, Jakarta: PT Bina Rena Pariwara: 1994.
- , *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Jilid II, Jakarta: PT Bina Rena Pariwara: 1994.
- , *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1998.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi revisi , Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003



Musgrave. Peggy B., *United States Taxation of Foreign Income: Issues and Arguments*, Cambridge: The Law School of Harvard University, 1969.

Martha, R.S.J., *The Jurisdiction to Tax in International Law, Theory and Practice of Legislative Fiscal Jurisdiction*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Netherlands: 1989.

Ongwamuhana, Kibuta, *The Taxation of Income from Foreign Investment, A Tax Study of Some Developing*: Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Boston: 1991.

Parthasarathy Shome, *Tax Policy Handbook*, Tax Policy Division Fiskal Affairs Department, International Monetary Fund, Washington, D.C.: 1995.

Sadhani, Djazoeli, Makalah berjudul: "*Pemeriksaan Pajak Menyongsong Milenium Ketiga: Suatu Telaahan Masa Depan*" dalam seminar sehari dengan tema Pemahaman Mengenai Pemeriksaan Pajak Bagi Akuntan Publik Menyambut Milenium Ketiga, Selasa, 11 Mei 1999, Hotel Kartika Candra, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan kelima, Jakarta: 2001, hal 24.

Soemitro, Rochmat, *Hukum Pajak Internasional Indonesia: Perkembangan dan Pengaruhnya*, PT Eresca, Jakarta, 1977.

———, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Jakarta, 1974.

Van Raad Kees., *Nondiscrimination in International Tax Law*, Series on International Taxation No.6, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer "London, Frankfurt, Boston", New York: 1986.

Tesis

Antawidjaya, Tubagus Djodi Rawayan, *Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Ditinjau dari Asas-Asas Perpajakan dan Kesederhanaan Administrasi Pajak*, Program Pascasarjana, Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2003.



Silitonga, Gamot, *Efektifitas Prosedur Pemeriksaan Pajak Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE – 06 / PJ.7 / 1999 Tanggal 11 Agustus 1999 (Seri Pemeriksaan 02 – 99) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Program Pascasarjana, Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Jakarta: 2001.*

Lain-lain

Majalah BERITA PAJAK, No.1477 / Tahun XXXV / 15 Oktober 2002, Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak.

Majalah BERITA PAJAK, No.1498 / Tahun XXXVI / 1 September 2003, Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak.

Majalah BERITA PAJAK, No.1499 / Tahun XXXVI / 15 September 2003, Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak.

Majalah BERITA PAJAK, No.1500 / Tahun XXXVI / 1 Oktober 2003, Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak.

Majalah BERITA PAJAK, No.1501 / Tahun XXXVI / 15 Oktober 2003, Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak.

Majalah BERITA PAJAK, No.1502 / Tahun XXXVI / 1 Nopember 2003, Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak.

Majalah BERITA PAJAK, No.1503 / Tahun XXXVI / 15 Nopember 2003, Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak.

Majalah BERITA PAJAK, No.1504 / Tahun XXXVI / 1 Desember 2003, Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak.

Majalah BERITA PAJAK, No.1505 / Tahun XXXVI / 15 Desember 2003, Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak.

Harian KOMPAS, Tahun ke 38, Tanggal 20 Juni 2003

Harian KOMPAS, Tahun ke 38, Tanggal 26 Juni 2003

Harian KOMPAS, Tahun ke 38, Tanggal 27 Juni 2003

Harian KOMPAS, Tahun ke 38, Tanggal 4 Juli 2003

Harian KOMPAS, Tahun ke 39 Tanggal 11 September 2003



Harian KOMPAS, Tahun ke 39 Tanggal 23 Oktober 2003

Harian KOMPAS, Tahun ke 39 Tanggal 28 Oktober 2003

Harian KOMPAS, Tahun ke 39, Tanggal 30 Januari 2004

Harian MEDIA INDONESIA, Tanggal 21 April 2002

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2000, *Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000*, tanggal 2 Agustus 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000, *Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2000*, tanggal 2 Agustus 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249 Tahun 2000, *Peraturan Pemerintah No. 137 tahun 2000*, tanggal 20 Desember 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.UM.o9.01 Tahun 2003, 294/KMK.03/2003, tanggal 25 Juni 2003 Tentang Tata Cara Penitipan penanggung Pajak yang disandera di Rumah Tahanan negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP - 459 / PJ. / 2002 tanggal 16 Oktober 2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 02 / PJ.75 / 2002 tanggal 22 April 2002 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 08 / PJ.75 / 2002 tanggal 17 Juli 2002 Tentang Pemeriksaan Untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit).